



FRAKSI PPP, AGUS TRIANTO

Tangkal Kebocoran Data, Targetkan Regulasi Pengamanan Siber



YOGYA (KR) - Peningkatan keamanan data siber dan efisiensi pelayanan publik kini menjadi agenda mendasak yang tengah diseriusi oleh legislatif. Guna menjawab tantangan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Transformasi Digital DPRD Kota Yogyakarta bergerak cepat menyusun regulasi yang komprehensif agar penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan dapat berjalan optimal dan aman.

Ketua Pansus Raperda Transformasi Digital DPRD Kota Yogyakarta Agus Trianto, menegaskan di era serba digital ini, aspek perlindungan data milik pemerintah maupun masyarakat sudah tidak boleh disepelekan lagi. Pasalnya, maraknya ancaman siber seperti kebocoran data pribadi belakangan ini berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan sistem pertahanan yang matang sejak dini.

Oleh karena itu, anggota Fraksi PPP ini menegaskan secara khusus ia akan mendorong eksekutif untuk membangun sistem pengamanan informasi yang berlapis. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial agar seluruh data penting dan sensitif tidak mu-

dah diretas maupun disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Agus menjelaskan kehadiran Perda Transformasi Digital ini nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum yang kuat dan jelas bagi Pemkot dalam menghadapi dinamika teknologi yang bergerak sangat cepat. "Kami ingin memastikan bahwa data masyarakat Kota Yogya terlindungi. Jangan sampai transformasi digital justru menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Di samping isu krusial mengenai keamanan siber, Agus juga membawa misi besar untuk mereformasi kualitas pelayanan publik agar menjadi jauh lebih efisien. Melalui pengawalan pansus ini, legislatif meminta agar implementasi konsep smart city di Kota Yogya tidak hanya sekadar mengejar predikat atau penghargaan formalitas semata, melainkan harus berorientasi pada hasil yang konkret.

Lebih lanjut, Agus menambahkan indikator keberhasilan digitalisasi daerah adalah adanya dampak kemudahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat saat mengakses layanan pemerintah. Menurutnya, di zaman yang serba praktis seperti sekarang, sudah saatnya pemerintah mengakhiri model alur birokrasi lama yang berbelit-belit dan tidak efektif karena hanya akan membebani warga.

"Jika regulasi ini resmi disahkan, Kota Jogja akan memiliki standar keamanan dan pelayanan digital yang lebih mumpuni, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah," pungkasnya.

(Dhi)-f



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005